

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu peristiwa penting dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada periode reformasi ini. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pilkada merupakan ekspresi demokrasi yang berupaya memilih langsung kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan berperan sebagai komponen paling signifikan dalam elemen sistem politik Indonesia dalam konteks kegiatan Pilkada ini. Pilkada merupakan cara memilih pemimpin daerah yang diharapkan dapat memimpin daerahnya menuju masa depan dan mewujudkan tujuan utama bangsa, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, agar hal tersebut dapat terwujud negara harus mampu mengayomi warganya untuk bisa terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Sebab, komponen terpenting dalam tatanan negara adalah partisipasi politik warga negaranya, karena hal ini berdampak signifikan terhadap berapa lama pemerintahan tetap berjalan dan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memimpinnya kedepan.

Partisipasi dalam politik sangat penting untuk proses membangun demokrasi. Dalam Pilkada, partisipasi politik adalah cara rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan di masa depan dan memastikan tidak ada yang menderita akibat keputusannya (Hufaiza Katarudin, 2020). Kemudian P. Huntington dan Joan M Nelson mendefinisikan keterlibatan politik dalam (Budiarjo, 2008) partisipasi politik berskala besar, yang meliputi mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah melalui tindakan berbasis individu atau keluarga. Jenis keterlibatan ini dapat berbasis individu atau kelompok, dan dapat diatur atau tidak terstruktur, tanpa menggunakan kekuatan apa pun. Semakin besar tingkat keterlibatan politik, semakin sadar dan terlibat masyarakat dengan aktivitas

kenegaraan. Di sisi lain, keterlibatan politik yang buruk biasanya menandakan bahwa masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan motivasi lebih untuk mengatasi masalah dengan kegiatan kenegaraan.

Ada kelompok pemilih yang relatif menarik untuk dipantau, yaitu pemilih pemula. Pemuda yang saat ini digembar-gemborkan menjadi *agent of change*, *moral force*, *iron stock* dan *social control* tentu tidak diragukan lagi mempunyai peran penting dalam mewujudkan perubahan dan kebangkitan bangsa. Selain itu, dibutuhkan generasi muda dan kader intelektual yang nantinya kedepan akan bekerja sebagai pegawai pemerintah atau pengamat politik untuk membangun bangsa. Akibatnya, partisipasi pemuda sangat penting karena mereka berpartisipasi aktif dalam sistem politik negara ini.

Dilansir dalam halaman daftar55.blogspot dengan judul “Pilkada Serentak 2018: Daftar 17 Pilkada Di Jawa Barat” yang terbit pada tanggal 2 Maret 2017. Menurut Michael Elkan, reporter berita, Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan 17 pilkada serentak pada 2018, di antaranya 1 Pemilihan Gubernur (Pilgub), 6 Pemilihan Walikota (Pilwalkot), dan 10 Pemilihan Bupati (Pilbup). Sebaliknya, Jabar hanya menggelar 3 pilkada di Kabupaten Cimahi, Tasikmalaya, dan Bekasi selama pilkada serentak 2017 lalu. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 16 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak antara lain Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis.

Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, di setiap momentum Pilkada mengalami sebuah kenaikan grafik partisipasi pemilih. Seperti yang dikemukakan oleh Adi Haryanto dalam laman sindonews yang terbit pada Jumat, 29 Juni 2018 dengan judul “KPU KBB Bersyukur Partisipasi Pemilih Mencapai 77,03%”. Data tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih dibanding dengan kuantitas partisipasi di tahun Pilkada sebelumnya yakni 2014 sekitar 74%.

Jumlah kenaikan grafik di Bandung Barat tentunya berangkat dari jumlah partisipasi politik yang ada di Desa. Desa Karangtanjung misalnya untuk Pilkada pada tahun 2018 jumlah dari partisipasinya di kisaran cukup tinggi yaitu 76,37%.

Pemilih pemula merupakan salah satu kategori pemilih yang cukup potensial karena jumlahnya tidak bisa dianggap sepele, karena itu para kontestan politik pasti banyak melirik segmen pemilih ini, selain itu sifatnya yang labil kemudian akan mudah diarahkan untuk menentukan pilihan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah partisipasi pemilih pemula yang ada di Desa Karangtanjung, dimana presentase pemilih pemula yang tercatat sudah memakai hak pilihnya di Pilkada Bandung Barat tahun 2018 ini berada pada kisaran 11,75%. Dalam wawancara bersama Ripki Ahmad Sulaeman pada Minggu, 24 September 2023 selaku Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat ia mengungkapkan bahwa pemilih pemula Kabupaten Bandung Barat yang datang ke TPS dan memberikan hak suaranya itu berkisar 15%an.

Pemilih pemula tentu mempunyai dampak besar pada kuantitas dan kualitas Pilkada. Dalam pemilihan umum, pemilih muda merupakan generasi baru yang berbeda dengan pemilih tua/lama dalam hal kualitas, sifat, latar belakang, pengalaman, dan tantangan. Sangat penting untuk memahami secara utuh berbagai karakteristik, latar belakang, pengalaman, dan persoalan yang dihadapi pemilih muda/pemula di Pilkada, jika ingin mendidik mereka menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berwawasan juga fokus akan masa depan, maka diperlukan berbagai solusi dan antisipasi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang akan datang dikemudian hari.

Karena tingkat partisipasi politik masyarakat menentukan keberhasilan Pilkada, tentu adanya faktor yang menyebabkan antusias dan tingginya partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Desa Karangtanjung selama pilkada serentak 2018. Untuk cakupan desa fenomena ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Pemilih pemula Desa Karangtanjung yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2018 jumlahnya sekitar 11,75%, Jika dibandingkan dengan 10 Desa lain yang ada di Kecamatan Cililin seperti Desa

Rancapanggung 10,64%, Nanggerang 11,5%, Mukapayung 11,51%, Kidangpananjung 11,08%, Karyamukti 11%, Karanganyar 8,80%, Bongas 9%, Batulayang 8,33%, Budiharja 10,18%, Cililin 11,25%, presentase nya bisa dikatakan minim. sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi faktor keterlibatannya pemilih pemula dan bagaimana proses juga bentuk keterlibatannya pemilih pemula Desa Karangtanjung dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul **“Keterlibatan Pemilih Pemula Desa Karangtanjung Pada Pilkada Bandung Barat Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilih pemula adalah mereka yang baru mulai memasuki usia mencoblos, yaitu 17 hingga 21 tahun, dan baru pertama kali memberikan suara. Maka pemilih pemula adalah mereka yang memberikan suara dalam pemilihan untuk pertama kalinya. Mengingat usianya yang masih muda, perilaku pemilih pemula ini acap kali dinilai cukup labil ketika mengikuti kontestasi politik untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Umum/Pilkada. Oleh karena itu, timbul beberapa konflik yang akan dirumuskan pada penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah peneliti kemukakan di atas. Penulis menentukan untuk merumuskan masalah menjadi berikut:

- a. Bagaimana keterlibatan pemilih pemula Desa Karangtanjung dalam pelaksanaan Pilkada Bandung Barat tahun 2018?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemilih pemula Desa Karangtanjung dalam Pilkada Bandung Barat tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk menggambarkan keterlibatan pemilih pemula Desa Karangtanjung pada pelaksanaan Pilkada Bandung Barat tahun 2018.
- b. Untuk menggambarkan apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemilih pemula Desa Karangtanjung pada pelaksanaan Pilkada Bandung Barat tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai harapan dan memberikan manfaat untuk banyak pihak baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan/keterangan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosial dan politik serta dalam bidang kajian yang berkaitan menggunakan pembahasan keterlibatan pemilih pemula dalam Pilkada.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salahsatu pengalaman pada penyusunan karya ilmiah. Temuan penelitian ini kemudian nantinya dapat memperluas wawasan masyarakat dan menjadi inspirasi untuk kontribusi kepada masyarakat luas tentang keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.